

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi hasil kesimpulan penelitian secara keseluruhan yang dilakukan dengan cara study literatur yang data-datanya diperoleh dari buku, jurnal, arsip, maupun artikel dalam internet. Kesimpulan adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdapat dalam bab pendahuluan yang telah dijawab pada bab sebelumnya dan akan diuraikan secara singkat di dalam bab ini. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi rekomendasi yang penulis berikan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk lebih mengembangkan penelitian selanjutnya.

5.1. KESIMPULAN

Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah menjadikan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan sebagai prioritas utama kebijakan perekonomian yang diterapkannya. Hal tersebut dikarenakan pangan, khususnya beras terkait langsung dengan stabilitas dan keamanan negara. Jika persediaan beras langka di pasaran, maka bisa dipastikan akan segera terjadi gejolak dalam masyarakat. Hal itulah yang pernah dialami oleh pemerintah Orde Baru pada awal masa pemerintahannya. Ketika itu, telah terjadi krisis beras yang disebabkan oleh kosongnya gudang-gudang BPUP akibat kurangnya pasokan beras dari dalam maupun luar negeri. Akibat dari kelangkaan tersebut, harga beras dipasaran sontak naik tak terkendali. Naiknya harga beras tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Reaksi yang keras pun kemudian muncul, masyarakat mulai turun ke jalan, menuntut pemerintah untuk segera melakukan tindakan guna menstabilkan kembali harga beras.

Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menstabilkan harga beras adalah dengan melakukan injeksi pasar secara besar-besaran menggunakan beras yang diperoleh dengan cara impor. Berkat injeksi pasar tersebut, harga beras dipasaran

berangsur-angsur turun dan dapat dikendalikan. Krisis beras yang terjadi pada tahun 1967 tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah bahwa beras harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup agar stabilitas keamanan negara dapat terjaga.

Komitmen pemerintah untuk menjamin ketersediaan beras tersebut kemudian terwujud dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian yang mulai diterapkan pada tahun 1969 tepatnya pada saat pelaksanaan PELITA I. Pada masa itu, sektor pertanian memang menjadi prioritas utama kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, semua usaha perekonomian diarahkan pada kemajuan sektor ini. Bersamaan dengan dimulainya PELITA I, pemerintah mengadopsi pelaksanaan Revolusi Hijau yang pada saat itu memang tengah marak dipraktekkan terutama di negara-negara berkembang. Pelaksanaan program Revolusi Hijau tersebut kemudian dituangkan dalam program intensifikasi, ekstensifikasi, serta diversifikasi pertanian.

Usaha-usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian tersebut mulai menunjukkan hasilnya pada saat memasuki dekade 1980an dan mencapai puncaknya pada tahun 1984 dengan berhasil diraihnya swasembada beras. Dunia dibuat berdecak kagum atas prestasi yang telah berhasil diraih oleh pemerintah Orde Baru. Betapa tidak, hanya dalam tempo 14 tahun pasca pelaksanaan Revolusi Hijau tersebut, Indonesia telah berhasil mentransformasikan diri dari negara pengimpor pangan menjadi negara pengekspor pangan.

Akan tetapi, sukses di bidang pertanian tersebut tidak dapat dipertahankan oleh pemerintah dalam waktu yang lama. Pasalnya, memasuki dekade 1990an produksi pertanian nasional cenderung mengalami perlambatan bahkan menunjukkan angka yang cenderung menurun. Bahkan, semenjak tahun 1992, Indonesia sudah tidak lagi berswasembada beras. Konsekuensi dari hal tersebut Indonesia harus kembali mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Terus menurunnya kinerja sektor pertanian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang melatar belaknginya. Faktor internal adalah perubahan strategi perekonomian pemerintah

Rina Anggraeni, 2013

Politik Beras Di Indonesia Pada Masa Orde Baru

dari yang asalnya bertumpu pada sektor pertanian beralih ke sektor industri, tingkat konsumsi beras masyarakat yang terus bertambah, konversi lahan pertanian untuk keperluan non-pertanian seperti industri, infrastruktur dan perumahan penduduk, serta dampak negatif dari Revolusi Hijau. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan globalisasi pertanian yang mulai diterapkan pasca diratifikasinya perjanjian pertanian hasil Putaran Uruguay. Selain itu, tekanan internasional melalui IMF dan WTO turut mempengaruhi mengapa Indonesia tidak lagi mampu berswasembada beras.

Terus menurunnya kinerja sektor pertanian tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, terutama terhadap kehidupan petani. Biaya yang dikeluarkan oleh petani semakin hari semakin mahal sedangkan hasil yang didapat tidak seberapa. Inilah yang kemudian menjadikan nasib petani menjadi semakin terpuruk. Selama ini, nasib petani memang tidak pernah terkabarkan baik. Bahkan, ketika Indonesia berhasil mencapai swasembada beraspun kehidupan mereka tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal tersebut terjadi karena selama ini kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah cenderung berat sebelah karena dinilai lebih mengutamakan kepentingan konsumen daripada petani produsen. Komitmen pemerintah untuk melakukan stabilisasi beras telah menyebabkan pemerintah selalu menekan harga beras seminimal mungkin. Akibatnya, petani harus menanggung kerugian karena biaya produksi yang semakin tinggi. Selain itu, rendahnya angka kepemilikan lahan menjadi penyebab lain mengapa kehidupan petani selalu berada pada garis subsistensi.

Perjanjian pertanian yang mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1995 dan tekanan IMF untuk meliberalisasi sektor pangan domestik turut memperparah kehidupan petani. Dengan diterapkannya liberalisasi pertanian, petani domestik harus berhadapan secara langsung dengan petani-petani dari negara lain, terutama petani dari negara-negara maju yang notabene sudah menggunakan teknologi yang lebih modern. Konsekuensi lain dari penerapan perjanjian tersebut adalah keharusan untuk mencabut subsidi pertanian dan menurunkan tarif biaya impor. Akibatnya, Indonesia kebanjiran produk pangan impor dan petani domestik

semakin tertindas karena biaya yang dikeluarkan untuk mengolah lahan menjadi semakin mahal akibat dicabutnya subsidi pertanian.

Penelitian ini juga menyoroti politik beras yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut terjadi karena beras tidak hanya berfungsi sebatas komoditi pangan saja, melainkan juga memiliki arti secara politis. Oleh karena itulah, pemerintah Orde Baru menjadikan beras sebagai alat politik untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaannya. Penerapan politik beras tersebut tercermin melalui keberadaan BULOG sebagai satu-satunya lembaga pangan yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru. Selain itu, BULOG juga merupakan bentuk intervensi pemerintah di bidang perberasan nasional. Melalui lembaga ini, pemerintah tidak saja memastikan keberadaan beras dipasaran saja, melainkan juga mengontrolnya melalui serangkaian kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh BULOG. Oleh karena itulah, bagi pemerintah Orde Baru, BULOG adalah institusi strategis dan kehadirannya merupakan bagian dari komitmen politik Orde Baru terhadap stabilitas ekonomi.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang dituangkan dalam skripsi ini, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

1. Lembaga UPI

Tulisan ini bisa dijadikan sumber bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai kebijakan pangan di Indonesia. Untuk Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, nilai-nilai yang terkandung dalam skripsi ini terutama mengenai permasalahan liberalisasi pertanian bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk membangun kesadaran dan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Untuk Jurusan Pendidikan Sejarah, tulisan ini dapat memperkaya penulisan dan sumber bacaan mengenai Sejarah Orde Baru.

2. Pihak Sekolah

Materi yang terdapat dalam skripsi ini bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran Sejarah Kelas XII Semester I, SK/KD 1.1 mengenai Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru. Dalam materi tersebut terdapat materi mengenai kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru serta pelaksanaan Revolusi Hijau.

3. Pemerintah

Swasembada pangan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dapat kembali diraih oleh negeri ini. Sebagai pemangku kebijakan publik, sudah saatnya pemerintah kembali menjadikan pertanian sebagai basis perekonomian negara. Hal tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai negara agraris. Selain itu, pemerintah juga harus mulai mensosialisasikan gerakan diversifikasi pangan kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat ketergantungan konsumsi terhadap beras.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini dapat dikembangkan ke arah sebuah permasalahan yang belum ditelaah secara serius oleh peneliti yaitu mengenai peranan BULOG pada masa Reformasi. Kajian mengenai peranan BULOG pada masa Reformasi merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih jauh mengingat pada masa Orde Baru, BULOG merupakan satu-satunya lembaga yang mengurus mengenai permasalahan pangan di Indonesia. Konsekuensi dari hal tersebut adalah BULOG diberikan keleluasaan serta berbagai hak istimewa untuk menjalankan berbagai tugasnya. Namun, semenjak tahun 1997 berbagai hak istimewa tersebut di cabut dan pada perkembangannya BULOG berubah menjadi perum dan hanya disertai tugas untuk menangani beras saja.